KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Pemerintah Diingatkan Jamin Kebebasan Berpendapat
Tanggal : Selasa, 29 Juni 2021
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 3

Pemerintah Diingatkan Jamin Kebebasan Berpendapat

Dikecam DPR, Pemanggilan BEM UI Membungkam Sikap Kritis

JAKARTA - Pemanggilan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia oleh rektorat terkait meme Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi sorotan banyak pihak. Terkait hal itu pemerintah diingatkan untuk tetap menjamin kebebasan berpendapat.

Atas pemanggilan itu Aliansi Aksi Solidaritas mengingatkan matinya iklim demokrasi di Kampus UI. Sedikitnya terdapat 44 perkumpulan yang tergabung dalam aliansi tersebut. "Pada 27 Juni 2021 kembali terjadi kasus pemberangusan kebebasan berpendapat yang menimpa BEM UI," kata Aliansi Aksi Solidaritas dalam keterangan tertulis, Minggu (27/6/2). "Melalui Surat Undangan Nomor 915/UN2.RI.KMHS/PDP.00.04.00/2021 Universitas Indonesia mengundang mahasiswa yang menjadi bagian dari BEM UI dan DPM UI yang berjumlah 10 orang."

Aliansi Aksi Solidaritas menilai surat pemanggilan oleh birokrat UI mengindikasikan bahwa aktor pemberangusan kebebasan berpendapat tidak hanya datang dari negara, tapi juga datang dari kampus. Hal itu menunjukkan bahwa kebebasan sipil semakin kerdil dan menyerang suara-suara yang menyatakan kebenaran kepada publik.

Saat ini konten yang diunggah di Instagram BEM UI diserang oleh *buzzer* melalui kolom komentar. Selain itu, Ketua BEM UI Leon Alvinda Putra juga diserang. "Adanya surat pemanggilan oleh birokrat UI mengindikasikan bahwa hari ini kebebasan sipil semakin dikerdilkan oleh negara dengan sistematis. Menimbang kronologi dan analisis peristiwa yang terjadi terhadap kawan-kawan UI yang berujung pada surat pemanggilan yang dilakukan terhadap BEM UI, tampak absennya negara dalam menjamin kebebasan berpendapat sepertiyang telah diaturdidalam UUD 1945 Pasal 28 dan UU Nomor 9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Pasal 7 undang-undang tersebut mengatur bagaimana aparatur negara wajib dan bertanggung jawab atas penyampaian pendapat yang dilakukan, termasuk melalui tulisan," tegasnya.

Pada meme yang diunggah akun resmi @BEMUI_Official, BEM UI menjuluki Presiden Jokowi sebagai The King of Lip Service alias Raja Membual.

Meme tersebut menyoroti paradoks pernyataan dan sikap Jokowi selama masa kepemimpinannya sejauh ini. Presiden ketujuh tersebut dinilai kerap mengobral janji manis, tapi tak selaras dengan realitas. Dari pernyataan rindu didemo, revisi UU ITE, penguatan KPK, dan rentetan janji lainnya.

Mantan Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mengecam keras Rektorat Universitas Indonesia (UI) yang memanggil BEM UI atas sikap kritis terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Langkah itu merupakan tindakan membungkam kebebasan berekspresi. "Sbg alumni UI, sy mengecam sikap Rektorat @univ_indonesia yg cenderung membungkam kebebasan berekspresi @BEMUI_Official," ujarnya lewat cuitan di akun @fadlizon, Minggu (27/6)

Dia mengatakan sikap kritis BEM UI harusnya dikaji dengan mendalam secara akademik di kampus. Bukan malah pengurus BEM UI dipanggil atau mereka diberi sanksi. "UI harusnya mengkaji n mendalami apa yg disampaikan BEM UI secara akademik. Coba masuk ke substansi n argumentasi. Sungguh memalukan pakai 'panggilan' segala," tulis politikus Partai Gerindra ini.

Tokoh Muda Nahdlatul Ulama (NU), Nadirsyah Hosen, ikut mengomentari kritik Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) lewat Meme kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) . Gus Nadir, sapaan akrabnya, mengatakan jangan sampai keluar narasi BEM Taliban atas sikap kritis BEM UI terhadap Jokowi tersebut. Apalagi jika pengurus BEM UI disuruh mengikuti tes wawasan kebangsaan (TWK) atas sikap kristisnya. "Yang penting jangan sampai keluar narasi BEM Taliban, atau disuruh ikut TWK," ujarnya lewat cuitan di akun @na_dirs, Minggu (27/6). Dia menyindir narasi "Taliban" cukup dimainkan untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saja. Seba, lanjutnya, mahasiswa yang kritis adalah aset bangsa yang harus dijaga.

Sementara itu, BEM UI membenarkan bahwa sejumlah pengurus dipanggil oleh pihak Rektorat UI atas unggahan di akun media sosial yang mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dia mengakui bahwa pemanggilan tersebut merupakan tindak lanjut postingan Twitter Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman. Dalam postingan Fadjroel tertulis bahwa segala aktivitas mahasiswa UI, termasuk BEM UI, merupakan tanggung jawab pimpinan UI. "Iya tindak lanjut itu (*posting* Fadjroel)," katanya.

Leon mengaku masih belum mengetahui secara jelas tindak lanjut pemanggilan tersebut. Dia mengatakan pihak Rektorat UI baru akan membahas perihal postingan akun media sosial BEM UI tersebut.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) berencana akan mendampingi sejumlah mahasiswa BEM UI yang direncanakan akan dipanggil oleh pihak Rektorat UI. "Kami sedang mendata orang-orang yang sudah siap mendampingi kawan-kawan BEM apabila diperlukan," ujar Ketua YLBHI, Asfinawati, ketika dikonfirmasi, Senin (28/6).

Dia menyebutkan perihal pemanggilan mahasiswa itu dapat merenggut kebebasan berekspresi dan dapat memengaruhi psikologi atau mental dari para pengurus BEM UI. "Bisa dikategorikan pembungkaman yang terlalu kelihatan motif kepentingannya, saya menganggap ini memalukan untuk kampus sekelas UI," katanya.

Asfinawati menambahkan pesan kritik tertulis yang disampaikan para anggota BEM UI terkait pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) khususnya sudah tepat. "Menurut YLBHI, sudah tepat yang disuarakan BEM UI tentang *lip service* khususnya yang paling nyata terkait KPK," ujarnya.

□ ***muhammad refi sandi/ krina sembiring/ erfan maaruf/ carlos royf***

3 Aksi Otokritik BEM UI yang Viral

Tahun 2018

Ketua BEM UI saat itu, Zaadit Taqwa nekat mengacungkan kartu kuning kepada Jokowi yang menghadiri Dies Natalis ke-68 UI di Kampus UI, Depok, Jumat (2/2/2018). "Kita memang ngasih peringatan buat Jokowi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa yang sedang terjadi, " kata Zaadit.

Tahun 2019

BEM UI lewat ketuanya, Manik Marganamahendra menyebut DPR sebagai Dewan Pengkhianat Rakyat dan menyampaikan mosi tidak percaya. Hal ini bermula saat ribuan mahasiswa turun ke jalan melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2019).

Tahun 2021

BEM UI menyebut Jokowi sebagai The King of Lip Service karena kerap mengumbar janji yang akhirnya tidak ditepati. Hal ini disampaikan BEM UI lewat postingan di akun Twitter-nya dan viral di media sosial. Ketua BEM UI, Leon Alvinda menjelaskan, postingan itu bertujuan untuk mengingatkan sang presiden terkait segala perkataan yang telah diucapkan.